

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah berisikan sumber-sumber teori yang mendukung variabel penelitian mengenai literasi keuangan, inklusi keuangan, sikap keuangan dan kinerja UMKM yang digunakan sebagai landasan pendukung teori dalam memperkuat penelitian.

2.1.1 Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam memahami prinsip-prinsip dasar keuangan sekaligus memiliki keahlian untuk mengambil keputusan yang tepat secara finansial dalam kehidupan sehari-hari (Innocent, 2019: 4). Dengan demikian, literasi keuangan mencakup aspek pengetahuan, kemampuan praktis, sikap positif, serta tindakan nyata yang dibutuhkan oleh individu untuk menentukan pilihan keuangan secara bijak demi mencapai kestabilan dan kesejahteraan secara ekonomi (Houston, 2020: 78).

Literasi keuangan adalah kemampuan memahami informasi yang berkaitan dengan keuangan serta keterampilan menerapkan informasi tersebut dalam membuat keputusan yang bijak mengenai keuangan pribadi (Priyanka, 2020: 14). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2019 literasi keuangan mencakup pemahaman terhadap istilah-istilah keuangan dan konsep-konsep, serta kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengelola sumber daya keuangan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Dapat disimpulkan maka Literasi keuangan adalah pemahaman tentang konsep-konsep keuangan dasar, seperti perencanaan keuangan, manajemen utang, tabungan, dan investasi, serta kemauan untuk menerapkannya dalam pengelolaan keuangan pribadi.

2.1.1.1 Tujuan Literasi Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 76/POJK.07/2020 membahas mengenai upaya peningkatan literasi serta inklusi keuangan dengan sasaran utama memperkuat pemahaman, keterampilan, serta sikap masyarakat agar mampu mengelola keuangannya secara optimal. Adapun beberapa tujuan dari literasi keuangan yang tercantum dalam peraturan tersebut, di antaranya adalah:

1. Peningkatan Kualitas dan Pengambilan Keputusan Keuangan Individu
Literasi keuangan bertujuan untuk membantu individu memahami konsep-konsep keuangan dasar sehingga dapat membuat keputusan keuangan yang lebih tepat, terencana, dan sesuai dengan kebutuhan, baik untuk kebutuhan saat ini maupun masa depan.
2. Perubahan pada Sikap dan Perilaku Individu dalam Mengelola Keuangan
Literasi keuangan bertujuan untuk mendorong individu mengadopsi sikap dan perilaku yang positif dalam mengelola keuangan, seperti kebiasaan menabung, pengelolaan utang yang sehat, dan pengalokasian sumber daya keuangan untuk investasi. Hal ini bertujuan agar individu mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga keuangan serta produk dan layanan keuangan yang tersedia dengan bijak untuk mencapai kesejahteraan finansial.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan misi penting dalam program literasi keuangan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas finansial melalui pendekatan edukasi. Tujuan utama dari misi ini adalah untuk membangun kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan secara bijak dan melindungi dari risiko penipuan di sektor keuangan.

2.1.1.2 Prinsip Dasar Literasi Keuangan

Prinsip utama Literasi Keuangan yang tercantum dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI, 2020) disusun guna menjamin efektivitas serta kesinambungan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keuangan. Berikut ini uraian mengenai masing-masing prinsip tersebut:

1. Terencana dan Terukur

Kegiatan literasi keuangan harus didasarkan pada konsep yang sesuai dengan sasaran dan kebijakan otoritas terkait. Program-program tersebut perlu memiliki indikator keberhasilan yang jelas untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak terhadap peningkatan literasi keuangan di masyarakat. Perencanaan yang baik memungkinkan pengumpulan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

2. Berorientasi pada Pencapaian

Program literasi keuangan dirancang untuk mencapai tujuan peningkatan pemahaman, keterampilan, dan sikap keuangan masyarakat secara optimal. Hal ini melibatkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, termasuk teknologi, sumber daya manusia, dan alam, untuk menciptakan hasil yang berdampak

luas.

3. Berkelanjutan

Program literasi keuangan tidak hanya dirancang untuk jangka pendek tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang. Pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) perlu menjaga keberlanjutan produk dan layanan keuangan, memastikan bahwa pengelolaan lembaga serta inovasi layanan keuangan tetap relevan dan dapat diakses oleh masyarakat di masa depan.

4. Kolaborasi

Prinsip ini menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku industri keuangan, akademisi, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program literasi keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal.

2.1.1.3 Manfaat Literasi Keuangan

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2019), terdapat tiga manfaat utama dari literasi keuangan yang memiliki peran dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan secara efektif serta mengurangi risiko kerugian dalam aspek finansial. Adapun manfaat yang dimaksud meliputi:

1. Kemampuan Memilih dan Memanfaatkan Produk serta Jasa Keuangan yang Sesuai dengan Kebutuhan

Literasi keuangan membantu individu dalam memahami berbagai produk dan jasa keuangan yang ada, sehingga dapat memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan, serta memiliki kemampuan untuk

merencanakan keuangan secara lebih efektif dan terarah.

2. Terhindar dari Aktivitas Investasi pada Instrumen Keuangan yang Tidak Jelas
Dengan literasi keuangan yang baik, masyarakat menjadi lebih waspada terhadap tawaran investasi yang tidak jelas atau mengandung unsur penipuan. Lebih mampu mengenali produk investasi yang berisiko tinggi atau bahkan ilegal.
3. Pemahaman Mengenai Manfaat dan Risiko Produk serta Layanan Jasa Keuangan

Literasi keuangan membantu masyarakat untuk memahami tidak hanya manfaat dari produk dan layanan keuangan, tetapi juga risiko yang mungkin timbul. Hal ini memungkinkan untuk membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana dan menghindari kerugian yang disebabkan oleh ketidaktahuan.

OJK juga berfokus pada pengembangan produk dan layanan keuangan yang mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat, terutama bagi UMKM yang masih kurang terlayani di sektor keuangan formal. Produk dan layanan ini perlu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diakses dengan mudah.

2.1.1.4 Klasifikasi dan Tingkat Literasi Keuangan

Tingkat Literasi Keuangan penduduk Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut (OJK, 2020).

1. Well Literate

Individu yang termasuk dalam kategori ini memiliki pengetahuan yang baik dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan dan produk-produk yang ditawarkan, termasuk fitur, manfaat, dan risiko yang terkait. Selain itu juga

memahami hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan yang cukup untuk menggunakan produk dan jasa tersebut dengan bijaksana dan efisien. Pengguna dalam kategori ini mampu membuat keputusan keuangan yang cerdas berdasarkan pemahaman yang mendalam.

2. *Sufficient Literate*

Individu dalam kategori ini memiliki pengetahuan dan keyakinan yang cukup tentang lembaga jasa keuangan dan produk serta jasa keuangan yang ditawarkan. Meskipun Pelaku UMKM memiliki pemahaman dasar yang memadai untuk menggunakan produk keuangan, Pelaku UMKM mungkin belum sepenuhnya menguasai semua fitur, manfaat, atau risiko yang terlibat. Pelaku UMKM masih membutuhkan lebih banyak edukasi dan pengalaman untuk mencapai tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi.

3. *Less Literate*

Pada kategori ini, individu memiliki pengetahuan dasar tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, tetapi pemahamannya terbatas. Pelaku UMKM mungkin hanya tahu sebagian kecil tentang berbagai produk keuangan atau tidak sepenuhnya memahami fitur dan manfaat produk tersebut. Orang-orang dalam kelompok ini cenderung memerlukan lebih banyak informasi dan pembelajaran agar dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik.

4. *Not Literate*

Individu yang termasuk dalam kategori ini tidak memiliki pengetahuan atau keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan layanan

keuangan. Pelaku UMKM tidak mengerti tentang produk atau layanan keuangan yang ada, dan mungkin tidak memiliki keterampilan untuk mengelola keuangan. Pelaku UMKM secara efektif. Kelompok ini membutuhkan edukasi dan peningkatan literasi keuangan yang mendasar untuk membangun pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan.

2.1.1.5 Indikator Literasi Keuangan

Adapun Indikator Literasi Keuangan menurut diantaranya (Sarpong-Kumankoma, 2023).

1. Pengetahuan Dasar Keuangan Pribadi

Mencakup pemahaman tentang dasar-dasar pengelolaan keuangan pribadi, seperti pengelolaan pendapatan, pengeluaran, dan perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan keuangan jangka pendek dan panjang. Pengetahuan dasar ini juga termasuk pemahaman tentang anggaran, pengelolaan utang, serta pentingnya memiliki dana darurat untuk menghadapi situasi yang tidak terduga.

2. Tabungan dan Pinjaman

Bagian ini mencakup pengetahuan tentang berbagai instrumen yang digunakan untuk menabung dan meminjam uang. Ini termasuk cara membuka dan mengelola tabungan di bank, memahami berbagai produk tabungan (seperti tabungan berjangka atau tabungan rencana), serta penggunaan pinjaman atau kredit, termasuk kartu kredit. Pengetahuan ini juga mencakup cara-cara bijak dalam menggunakan pinjaman tanpa menambah beban utang yang tidak terkelola dengan baik.

3. Asuransi

Pengetahuan mengenai asuransi adalah aspek penting dalam literasi keuangan karena asuransi membantu individu melindungi diri dari risiko finansial yang tak terduga. Ini termasuk pemahaman tentang berbagai jenis asuransi, seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi kendaraan bermotor, serta bagaimana memilih polis yang tepat sesuai dengan kebutuhan pribadi. Pengetahuan ini juga mencakup cara memahami manfaat dan klaim yang dapat diajukan melalui polis asuransi.

4. Investasi

Pengetahuan tentang investasi sangat penting untuk membantu individu membangun kekayaan dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Ini mencakup pemahaman tentang instrumen investasi seperti suku bunga pasar, reksa dana, saham, obligasi, serta risiko yang terkait dengan setiap jenis investasi. Pengetahuan ini juga mencakup cara-cara untuk menilai risiko dan imbal hasil yang dapat diperoleh dari berbagai produk investasi.

2.1.2 Inklusi Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan adalah suatu konsep yang merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama yang kurang terlayani, memiliki akses yang memadai terhadap berbagai layanan dan produk keuangan yang relevan dan terjangkau.

Inklusi keuangan merupakan suatu upaya untuk menjamin individu atau keluarga yang sebelumnya tidak bisa mengakses layanan keuangan formal agar

dapat memanfaatkan layanan tersebut demi peningkatan kondisi ekonomi mereka (Mallick, S. K, 2019: 89). Kondisi inklusi keuangan menunjukkan situasi di mana masyarakat mampu memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan baik, termasuk akses terhadap produk seperti tabungan, kredit, investasi, asuransi, serta fasilitas pembayaran untuk mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka (Khalid, T, 2022: 14). Secara khusus, inklusi keuangan adalah kondisi ketika individu atau badan usaha mampu mengakses berbagai produk dan layanan keuangan yang mendukung aktivitas ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM, serta bisa digunakan secara mudah dan terjangkau (Sulistyowati, 2021: 85).

Menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 76/POJK.07/2020 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, inklusi keuangan bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan. Dengan tersedianya layanan ini, semua individu dan pelaku usaha kecil dapat lebih mudah menggunakan produk keuangan secara optimal. Hal tersebut secara khusus memberikan manfaat besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang dapat memanfaatkan layanan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, inklusi keuangan berperan penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, inklusi keuangan dapat disimpulkan sebagai kondisi tersedianya akses layanan keuangan melalui berbagai lembaga, produk, maupun jasa keuangan yang mudah dijangkau, nyaman digunakan, serta aman bagi semua

kalangan masyarakat, dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan mereka dalam rangka mencapai kesejahteraan. Kesimpulan ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh OJK.

2.1.2.2 Kebijakan Inklusi Keuangan

Kebijakan keuangan inklusif terdiri atas pilar-pilar serta fondasi dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang dilengkapi dengan indikator-indikator khusus. Implementasi kebijakan tersebut juga melibatkan koordinasi antar kementerian, lembaganya maupun instansi terkait, serta didukung oleh langkah-langkah aksi keuangan inklusif. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, beberapa pilar utama dari kebijakan inklusi keuangan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pilar Edukasi Keuangan

Pilar ini fokus pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk dan layanan keuangan yang tersedia, serta fitur, manfaat, risiko, biaya, hak, dan kewajiban yang terlibat. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat memahami bagaimana mengelola keuangan secara efektif, termasuk dalam hal perencanaan dan pengelolaan keuangan pribadi. Edukasi ini bertujuan untuk membuat masyarakat lebih cerdas dalam membuat keputusan finansial, yang pada gilirannya akan meningkatkan stabilitas keuangan individu dan keluarga.

2. Pilar Hak Properti Masyarakat

Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kredit dan fasilitas keuangan lainnya dari lembaga keuangan formal. Hal ini mencakup

upaya untuk menyediakan akses yang lebih luas dan mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman atau kredit yang sesuai dengan kebutuhan Pelaku UMKM, seperti untuk membeli rumah, kendaraan, atau memulai usaha. Akses ke kredit yang lebih baik dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

3. Pilar Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan

Pilar ini bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan, terutama untuk kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlayani. Hal ini mencakup pengembangan dan perluasan saluran distribusi produk keuangan, baik melalui lembaga keuangan tradisional maupun inovasi teknologi, seperti *fintech* (teknologi finansial). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk dan layanan keuangan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk Pelaku UMKM yang tinggal di daerah terpencil atau dengan pendapatan rendah.

4. Pilar Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah

Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi dalam pelayanan publik, terutama dalam penyaluran dana Pemerintah. Dengan mengutamakan penggunaan sistem pembayaran non-tunai, pemerintah berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Ini mencakup layanan pembayaran seperti gaji pegawai, bantuan sosial, dan dana lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk masyarakat.

5. Pilar Perlindungan Konsumen

Pilar ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan. Aspek utama dari perlindungan konsumen adalah memastikan transparansi, keadilan, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data konsumen dalam transaksi keuangan. Selain itu, juga penting untuk menyediakan mekanisme pengaduan yang efisien serta penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan terjangkau bagi konsumen, agar Pelaku UMKM merasa lebih dilindungi dan dihargai.

2.1.2.3 Faktor Yang Memengaruhi Inklusi Keuangan

Faktor yang memengaruhi inklusi keuangan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk faktor ekonomi, sosial, teknologi, dan kebijakan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang memengaruhi inklusi keuangan (Singh, K, 2019: 3) :

1. Faktor Ekonomi

Masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi memiliki kemampuan lebih untuk mengakses layanan keuangan, seperti pinjaman, investasi, dan asuransi. Negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung memiliki infrastruktur keuangan yang lebih baik, serta menciptakan lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan.

2. Faktor Sosial dan Demografi

Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih literat dalam hal keuangan dan memiliki akses yang lebih besar ke layanan keuangan karena lebih memahami manfaat dan risiko produk keuangan. Misalnya, usia muda mungkin lebih tertarik pada produk investasi atau pinjaman untuk

pendidikan, sementara usia lebih tua lebih fokus pada tabungan pensiun.

Perempuan sering menghadapi hambatan lebih besar dalam mengakses layanan keuangan dibandingkan pria, baik karena faktor sosial, budaya, maupun kurangnya pengetahuan tentang keuangan.

3. Faktor Teknologi

Akses ke internet dan penggunaan perangkat mobile meningkatkan peluang bagi individu untuk mengakses layanan keuangan digital, seperti mobile banking, e-wallet, dan pembayaran digital. Teknologi ini memungkinkan masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan untuk mengakses produk keuangan dengan lebih mudah.

4. Faktor Kebijakan dan Regulasi

Program inklusi keuangan nasional yang digagas oleh pemerintah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperluas akses Pelaku UMKM ke layanan keuangan formal. Kebijakan yang mendukung penguatan sektor keuangan akan mendorong lembaga keuangan untuk menjangkau lebih banyak segmen pasar.

5. Faktor Infrastruktur

Adanya cabang bank, ATM, dan lembaga keuangan lainnya yang tersebar di berbagai wilayah mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan keuangan. Ketersediaan lembaga ini di area terpencil dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan.

6. Faktor Budaya

Tingkat kepercayaan terhadap bank dan lembaga keuangan memengaruhi partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal. Jika masyarakat tidak merasa yakin atau memiliki pengalaman negatif dengan lembaga keuangan, Pelaku UMKM lebih cenderung untuk menghindari layanan keuangan.

2.1.2.4 Indikator Inklusi Keuangan

Menurut Bank Indonesia (2014), terdapat beberapa indikator utama untuk mengukur perkembangan inklusi keuangan di sebuah negara, antara lain:

1. Akses/Ketersediaan

Mengacu pada kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan formal yang mudah dijangkau secara fisik maupun terjangkau dari sisi biaya.

2. Penggunaan

Mengacu pada tingkat pemanfaatan secara nyata atas produk dan layanan keuangan, seperti frekuensi, intensitas, dan durasi penggunaannya.

3. Kualitas

Mengevaluasi sejauh mana karakteristik produk atau layanan keuangan telah sesuai dengan kebutuhan para pengguna.

4. Kesejahteraan

Mengevaluasi dampak positif yang dihasilkan oleh layanan keuangan terhadap peningkatan taraf hidup penggunanya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan empat indikator utama untuk menilai tingkat inklusi keuangan, sebab indikator-indikator tersebut telah

diterapkan dalam berbagai penelitian di sejumlah negara dengan situasi serta karakteristik responden yang bervariasi.

2.1.3 Sikap Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Sikap Keuangan

Sikap keuangan adalah perilaku dan pandangan individu atau kelompok terhadap pengelolaan dan penggunaan sumber daya keuangan Pelaku UMKM. Sikap keuangan mencakup keyakinan, persepsi, dan kebiasaan seseorang dalam membuat keputusan terkait pengelolaan uang, termasuk tabungan, investasi, pengeluaran, dan perencanaan keuangan (Patricia, E, 2020: 5).

Sikap keuangan adalah cara individu mengelola dan menanggapi aspek-aspek keuangan dalam hidup Pelaku UMKM, seperti kebiasaan menabung, perilaku pengeluaran, dan keputusan terkait investasi (Dewi, A. S, 2021: 4). Sikap keuangan adalah persepsi dan kepercayaan individu yang memengaruhi bagaimana merencanakan dan mengelola keuangan Pelaku UMKM. Sikap ini dapat mencakup aspek-aspek seperti rasa cemas terhadap keuangan, kecenderungan untuk menunda keputusan finansial, atau keinginan untuk berinvestasi dan merencanakan masa depan secara lebih hati-hati. (Wijaya, G. E, 2020: 4). sikap keuangan adalah elemen penting dalam pengambilan keputusan keuangan yang rasional. Ini mencakup kebiasaan-kebiasaan finansial yang terbentuk sejak dini dan cara individu melihat pengelolaan keuangan sebagai sesuatu yang penting atau tidak penting dalam kehidupan (Iradianty, A, 2019).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan sikap keuangan adalah bagaimana individu atau kelompok melihat dan memperlakukan uang serta keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan finansial, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengetahuan, pengalaman, serta konteks sosial dan budaya.

2.1.3.2 Faktor Yang Memengaruhi Sikap Keuangan

Sikap keuangan seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu seseorang mengembangkan sikap keuangan yang lebih positif dan efektif. Berikut adalah beberapa faktor utama yang memengaruhi sikap keuangan (Adiputra, 2021: 4) :

1. Pendidikan dan Literasi Keuangan

Pendidikan formal dan pemahaman tentang konsep keuangan seperti anggaran, tabungan, investasi, dan utang sangat berpengaruh terhadap cara seseorang mengelola keuangan. Individu dengan tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi cenderung membuat keputusan finansial yang lebih bijak, lebih mampu menghindari jebakan utang, dan memiliki strategi yang lebih baik dalam merencanakan keuangan jangka panjang.

Pengalaman Pribadi

Pengalaman hidup, baik yang positif maupun negatif, membentuk pola pikir dan perilaku keuangan seseorang. Misalnya, seseorang yang pernah mengalami kebangkrutan atau kehilangan uang akibat keputusan investasi yang buruk mungkin akan menjadi lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan. Sebaliknya, pengalaman positif, seperti berhasil menabung untuk tujuan

tertentu, dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kecenderungan untuk melanjutkan kebiasaan finansial yang sehat.

2. Lingkungan Sosial dan Budaya

Keluarga, teman, dan masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap sikap keuangan seseorang. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga mengenai pentingnya menabung, menghindari utang, atau berbagi uang dapat membentuk kebiasaan keuangan. Budaya juga memengaruhi bagaimana seseorang melihat uang dan pengelolaannya, apakah lebih mengutamakan pengeluaran untuk konsumsi atau lebih memilih menabung dan berinvestasi.

3. Psikologi dan Emosi

Faktor psikologis memainkan peran penting dalam keputusan keuangan seseorang. Kepercayaan diri dalam mengelola keuangan, kemampuan untuk menunda kepuasan, dan kontrol terhadap dorongan emosional sangat memengaruhi pola pengeluaran dan investasi. Misalnya, orang yang cemas atau stres tentang uang mungkin cenderung membuat keputusan yang impulsif atau kurang rasional, seperti berbelanja berlebihan atau menghindari investasi.

4. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi pribadi dan ekonomi makro dapat memengaruhi sikap keuangan. Jika seseorang berada dalam kondisi keuangan yang stabil, dengan penghasilan yang baik dan sedikit atau tidak ada hutang, Pelaku UMKM cenderung lebih optimis dalam merencanakan masa depan keuangan Pelaku UMKM. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang buruk, seperti resesi atau inflasi yang tinggi, dapat memunculkan rasa khawatir, yang dapat mengubah cara

seseorang mengelola keuangan, seperti mengurangi pengeluaran atau menunda investasi.

5. Nilai dan Tujuan Pribadi

Setiap orang memiliki tujuan hidup yang berbeda, dan tujuan ini sering kali mencerminkan nilai-nilai pribadi Pelaku UMKM. Misalnya, seseorang yang menilai kemandirian finansial sebagai nilai penting mungkin akan lebih fokus pada menabung dan berinvestasi.

2.1.3.3 Indikator Sikap Keuangan

Sikap keuangan adalah pola pikir, perilaku, dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang dalam mengelola, menggunakan, dan merencanakan keuangan pribadi atau keluarga. Ini mencakup bagaimana seseorang mengambil keputusan terkait penghasilan, tabungan, investasi, utang, pengeluaran, dan manajemen risiko keuangan. Indikator *financial attitude* dijabarkan sebagai berikut (Anthony dalam Setiyani, R, 2018: 4) :

1. Sikap terhadap perilaku keuangan sehari-hari”

Bagaimana seseorang memandang dan mengelola pengeluaran harian Pelaku UMKM. Sikap positif dalam perilaku keuangan sehari-hari menunjukkan kecenderungan untuk mengelola uang dengan bijaksana, seperti menghindari pemborosan, berbelanja dengan bijak, dan memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting dari pada keinginan sesaat.

2. Sikap terhadap rencana penghematan

Proses menabung dan merencanakan penghematan. Seseorang dengan sikap positif terhadap penghematan biasanya memahami pentingnya memiliki dana

cadangan untuk masa depan, serta merencanakan dan menyisihkan sebagian pendapatan untuk tujuan jangka panjang.

3. Sikap terhadap manajemen keuangan

Cara seseorang mengelola dan memantau keuangan Pelaku UMKM, seperti mencatat pengeluaran, membuat anggaran, dan merencanakan tujuan keuangan. Sikap positif dalam manajemen keuangan mencerminkan seseorang yang terorganisir dalam keuangan, disiplin dalam mengikuti anggaran, dan fokus pada pencapaian tujuan keuangan.

4. Sikap terhadap kemampuan keuangan masa depan

Sikap ini berkaitan dengan pandangan seseorang terhadap pentingnya mempersiapkan keuangan untuk masa depan, baik itu untuk pensiun, pendidikan anak, atau tujuan lainnya. Individu yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan keuangan masa depan akan merencanakan keuangan Pelaku UMKM dengan cermat, menginvestasikan uang untuk jangka panjang, dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masa depan.

2.1.4 Kinerja UMKM

2.1.4.1 Pengertian Kinerja UMKM

Kinerja UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) menurut ahli dapat dijelaskan sebagai hasil atau pencapaian yang diukur dari aktivitas dan proses bisnis yang dilakukan oleh UMKM dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja ini biasanya dinilai melalui berbagai indikator seperti pertumbuhan pendapatan, profitabilitas, keberlanjutan usaha, efisiensi Operasionalisasi, serta kemampuan berinovasi dan bersaing di pasar.

Kinerja UMKM merupakan aspek finansial, tetapi juga aspek non-finansial seperti kepuasan pelanggan, pengembangan produk, serta kontribusi pada pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja (Hasibuan, 2020: 9).

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP No. 07/2021) adalah regulasi yang ditujukan untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada sektor koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. Berikut beberapa poin utama yang tercakup dalam PP No. 07/2021 :

1. Definisi Koperasi dan UMKM:

PP No. 07/2021 memberikan definisi yang jelas untuk koperasi dan UMKM. Hal ini penting untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan entitas yang berhak mendapatkan manfaat dari regulasi ini.

2. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Peraturan ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mendorong pemberdayaan koperasi dan UMKM, termasuk dengan memberikan akses ke pembiayaan, pelatihan, sertifikasi, dan bimbingan teknis.

3. Pemberian Kredit

PP No. 07/2021 mengatur tentang pemberian kredit kepada koperasi dan UMKM oleh lembaga keuangan. Hal ini dapat membantu koperasi dan UMKM untuk mengembangkan usaha.

4. Pajak dan Beban Administrasi

Regulasi ini juga membahas pembebasan atau keringanan pajak serta pengurangan beban administrasi bagi koperasi dan UMKM. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban finansial yang mungkin dihadapi oleh entitas ini.

5. Pemberian Subsidi

PP No. 07/2021 memungkinkan pemerintah untuk memberikan subsidi kepada koperasi dan UMKM sebagai bentuk dukungan keuangan.

6. Pengembangan Pasar dan Jaringan

Regulasi ini mencakup aspek pengembangan pasar dan jaringan untuk produk dan jasa yang dihasilkan oleh koperasi dan UMKM.

7. Perlindungan Hukum

Memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan, aset, dan hak koperasi dan UMKM, serta mengatasi sengketa yang melibatkan entitas tersebut.

8. Pemberian Sertifikasi

PP No. 07/2021 memungkinkan pemberian sertifikasi untuk produk-produk koperasi dan UMKM yang memenuhi standar kualitas dan keamanan tertentu.

9. Transparansi dan Akuntabilitas

Regulasi ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi dan UMKM.

Kinerja UMKM menurut definisi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro yaitu kegiatan ekonomi produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi persyaratan usaha mikro sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut.
2. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi produktif mandiri, yang tidak merupakan anak perusahaan ataupun cabang dari UMKM lainnya, serta tidak berada dalam penguasaan atau kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau besar, yang memenuhi ketentuan usaha kecil sesuai aturan dalam undang-undang tersebut.
3. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi produktif mandiri yang dilakukan oleh individu atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari UMKM lain, dan tidak dimiliki maupun dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh usaha kecil atau usaha besar, dengan kriteria jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 6, klasifikasi UMKM yang sudah berjalan didasarkan pada nilai penjualan tahunan, yaitu:

1. Usaha Mikro,yaitu usaha yang mencatatkan hasil penjualan tahunan paling tinggi sebesar Rp2 miliar.
2. Usaha Kecil, yaitu usaha dengan hasil penjualan tahunan di atas Rp2 miliar hingga maksimal Rp15 miliar.
3. Usaha Menengah, yakni usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp15 miliar, dengan batas maksimal Rp50 miliar.

Adapun untuk UMKM yang baru akan didirikan, kriterianya berdasarkan modal usaha adalah sebagai berikut:

- 1 Usaha Mikro yaitu usaha dengan modal maksimal Rp1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan sebagai lokasi usaha.
- 2 Usaha Kecil merupakan usaha dengan modal usaha lebih dari Rp1 miliar hingga batas tertinggi Rp5 miliar, di luar tanah dan bangunan tempat usaha.
- 3 Usaha Menengah memiliki modal usaha di atas Rp5 miliar sampai batas maksimum Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2.1.4.2 Tujuan dan Kendala UMKM

Dalam sistem perekonomian sebuah negara, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu unsur penting yang menopang pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang UMKM, tujuan utama pendirian UMKM adalah mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru serta mengembangkan usaha yang sudah ada guna memperkuat perekonomian nasional yang berbasis demokrasi ekonomi yang adil.

Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia juga menegaskan bahwa UMKM memiliki posisi yang strategis dalam upaya pembangunan ekonomi nasional. Keberadaan UMKM tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memainkan peran vital dalam proses pemerataan hasil pembangunan secara lebih luas kepada masyarakat.

Namun demikian, dalam menjalankan perannya, UMKM masih sering menghadapi berbagai kendala operasional maupun strategis. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2018, beberapa hambatan yang umum dialami oleh para pelaku UMKM di antaranya adalah permasalahan akses permodalan, keterbatasan pasar, serta rendahnya tingkat keterampilan dan kemampuan manajerial pelaku usaha. Berbagai kendala tersebut perlu mendapat perhatian khusus agar potensi UMKM dapat dimaksimalkan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Terdapatnya kendala menurut (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018). Kendala yang dialami oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat dikategorikan ke dalam dua aspek utama, yaitu hambatan internal dan eksternal.

Pada aspek internal, masalah utama yang sering dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan modal. Sekitar 60% hingga 70% pelaku UMKM belum memiliki akses ke fasilitas pembiayaan dari lembaga perbankan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain hambatan geografis, di mana layanan perbankan belum sepenuhnya menjangkau wilayah pelosok dan terpencil. Selain itu, kendala administratif juga menjadi persoalan serius, karena pengelolaan bisnis UMKM umumnya masih dilakukan secara manual dan tradisional, khususnya dalam manajemen keuangan yang belum bisa membedakan antara dana operasional usaha dengan kebutuhan rumah tangga.

Hambatan berikutnya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Para pelaku UMKM cenderung masih kurang memahami teknologi terbaru dalam proses produksi serta pengendalian mutu produk. Selain itu, pelaku usaha belum sepenuhnya mampu membaca dengan baik kebutuhan pasar sehingga sering kali

gagal menangkap peluang pasar secara optimal. Dalam aspek pemasaran, sebagian besar UMKM masih menggunakan metode tradisional seperti pemasaran dari mulut ke mulut (*mouth to mouth marketing*), dan belum secara maksimal memanfaatkan media sosial atau internet sebagai sarana pemasaran. Keterbatasan kuantitas tenaga kerja juga menjadi kendala, dikarenakan kemampuan membayar gaji terbatas sehingga pemilik UMKM seringkali masih terlibat langsung dalam persoalan teknis sehari-hari, tanpa fokus ke perencanaan strategis bisnis jangka panjang.

Dalam aspek hukum, mayoritas UMKM masih berbentuk badan usaha perorangan. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam aspek legal dan kredibilitas usaha. Selain itu, akuntabilitas juga menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar UMKM belum memiliki sistem administrasi keuangan dan manajemen yang terstruktur dengan baik.

Sedangkan dari segi eksternal, iklim usaha yang kurang kondusif menjadi tantangan yang cukup besar bagi UMKM. Koordinasi antar pemangku kepentingan seperti lembaga pemerintah, institusi pendidikan, lembaga keuangan, dan asosiasi usaha masih terkesan kurang sinergis dan cenderung berjalan masing-masing. Selain itu, permasalahan legalitas usaha, prosedur perizinan yang rumit, biaya transaksi yang tinggi, serta dukungan infrastruktur yang belum optimal turut memperburuk kondisi usaha. Keterbatasan infrastruktur usaha terutama terkait alat dan teknologi produksi, yang masih sederhana, menjadi kendala tambahan.

Selanjutnya, persoalan akses menjadi hambatan lain yang signifikan. Terbatasnya akses terhadap bahan baku berkualitas menyebabkan UMKM kerap menggunakan bahan baku yang rendah kualitasnya. Selain itu, akses terhadap

teknologi juga sangat terbatas, terutama jika pasar dikuasai oleh bisnis besar atau kelompok tertentu. UMKM juga mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan selera konsumen yang cepat, terlebih lagi bagi mereka yang sudah memasuki pasar ekspor, sehingga sering kalah bersaing dengan UMKM lain yang memiliki modal lebih kuat dan besar.

2.1.4.3 Pengukuran Kinerja

Balanced Scorecard (BSC) adalah salah satu metode yang sangat berguna dalam mengukur dan mengelola kinerja suatu organisasi, termasuk UMKM. Dalam konteks UMKM, BSC berfungsi untuk memberikan pandangan yang lebih menyeluruh mengenai kinerja usaha dengan melihat berbagai perspektif yang saling terkait. BSC tidak hanya mengandalkan pengukuran dari sisi keuangan, tetapi juga memperhatikan perspektif lain yang mendukung keberhasilan jangka panjang, seperti proses internal, pelanggan, dan pembelajaran serta pertumbuhan.

Maka di berbagai UMKM menerapkan metode tersebut yang dapat digunakan sebagai berikut (Fikri, 2023: 11): ”

1. Mengklarifikasi dan menghasilkan konsensus mengenai strategi

Langkah pertama yang krusial adalah memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan dalam UMKM memiliki pemahaman yang jelas tentang strategi yang akan dijalankan. Proses ini melibatkan diskusi dan klarifikasi untuk mendapatkan kesepakatan bersama tentang arah dan tujuan strategi yang akan diambil.

2. Mengkomunikasikan strategi ke seluruh UMKM

Setelah strategi disepakati, penting untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada seluruh anggota organisasi, dari manajemen hingga karyawan. Komunikasi yang baik akan memastikan bahwa semua pihak tahu peran Pelaku UMKM dan bagaimana kontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis.

3. Menyelaraskan berbagai tujuan departemen dan pribadi dengan strategi UMKM

Agar setiap departemen dan individu dapat bekerja secara efisien, tujuan perlu diselaraskan dengan tujuan strategis UMKM. Ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh setiap bagian organisasi memiliki kontribusi langsung terhadap visi dan misi UMKM.

4. Mengaitkan berbagai tujuan strategis dengan sasaran jangka panjang dan anggaran tahunan

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa tujuan yang lebih besar atau jangka panjang dapat tercapai dengan cara yang terukur melalui sasaran tahunan yang lebih terperinci. Anggaran yang disusun juga harus sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut.

5. Mengidentifikasi dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis

Setelah strategi ditetapkan, penting untuk mengidentifikasi inisiatif yang akan membantu mencapai tujuan strategis. Inisiatif tersebut perlu diselaraskan dengan visi UMKM, agar tidak ada kegiatan yang tumpang tindih atau tidak relevan.

6. Melaksanakan peninjauan ulang strategis secara periodik dan sistematik

Untuk memastikan bahwa strategi yang dijalankan masih relevan dan efektif, penting untuk melakukan peninjauan ulang secara rutin. Ini memungkinkan UMKM untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dan membuat penyesuaian strategi jika diperlukan.

7. Mendapatkan umpan balik yang dibutuhkan untuk mempelajari dan memperbaiki strategi

Umpan balik adalah komponen penting dalam siklus strategi. Dengan mendapatkan umpan balik dari berbagai sumber, UMKM dapat belajar dari pengalaman dan hasil yang telah dicapai, serta memperbaiki strategi untuk meningkatkan kinerja di masa depan.

2.1.4.4 Indikator Kinerja UMKM

Terdapat indikator kinerja UMKM adalah sebagai berikut (Kaplan & Norton, 2020: 75) :

1. Keuangan

Keuangan mengukur hasil dari strategi yang diterapkan dalam hal keuntungan dan pertumbuhan usaha. Mengidentifikasi apakah strategi yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap profitabilitas dan perkembangan usaha, yang pada akhirnya akan memperkuat posisi keuangan UMKM.

2. Pelanggan

Kepuasan pelanggan adalah salah satu elemen yang paling penting dalam menentukan keberhasilan UMKM. Pelanggan adalah sumber utama dari pendapatan, sehingga pengukuran terhadap tingkat kepuasan pelanggan

menjadi krusial. Memastikan bahwa UMKM dapat memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan untuk memperkuat hubungan dan mempertahankan loyalitas pelanggan.

3. Proses bisnis internal

Perspektif ini fokus pada proses internal yang harus dikuasai UMKM untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Menyempurnakan proses bisnis internal agar lebih efisien dan dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan lebih baik.

4. Pembelajaran dan pertumbuhan

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia, yaitu karyawan. Pembelajaran dan pertumbuhan di sini mencakup peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan motivasi karyawan untuk mendukung pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang UMKM. Kemampuan karyawan yang berkembang akan mendukung inovasi dan peningkatan dalam proses bisnis serta pelayanan pelanggan, yang pada gilirannya mendukung pencapaian.

2.2 Penelitian Terdahulu

Persamaan dan perbedaan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan dapat dilihat pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Nama Peneliti/Tahun/ Judul	Hasil Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Sumber		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
1	Fikri (2023) <i>The Effect of Financial Literacy on</i>	<i>Financial Literacy</i> berpengaruh terhadap kinerja	Kuantitatif, Deskriptif Verifikatif	Meneliti literasi keuangan terhadap kinerja UMKM	Penelitian ini menggunakan akses keuangan dan sikap risiko	Jurnal Vol. 6, No. 2	Economic	Resource,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>MSME Performance Through Financial Access and Financial Risk Attitude as a Mediation Variable</i>	UMKM melalui akses keuangan dan sikap risiko keuangan sebagai mediasi		Meneliti Deskriptif Verifikatif	keuangan sebagai variabel mediasi, tempat penelitian berbeda	
2	Qhodriyah. (2022) <i>The Effect Of Financial Literacy And Financial Inclusion On The Performance Of Msmes In. Bangkalan District</i>	<i>Financial Literacy</i> memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM	Kuantitatif, Deskriptif Verifikatif	Meneliti literasi keuangan, inklusi keuangan, dan kinerja UMKM	Tempat penelitian berbeda, metode pengumpulan data berbeda UMKM	<i>Proceeding International Conference on Economic Business Management, and Accounting (ICOEMA)</i>
3	Mallik, G (2021) <i>Determinants of Financial Literacy: Empirical Evidence from Micro and Small Enterprises in India</i>	Literasi keuangan memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM	Kuantitatif, Deskriptif Verifikatif	Meneliti dampak literasi keuangan dan kinerja UMKM	Lokasi penelitian di India, objek keuangan dan kinerja berbeda UMKM	<i>Asia Pacific Management Review</i> , 26, 248-255
4	Zulkieflimansyah, et al (2020) <i>The Effect of Financial Literation on the Financial Performance of SME with Financial Inclusion as Intervening Variables</i>	Literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM melalui inklusi keuangan sebagai variabel intervening	Kuantitatif, Deskriptif Verifikatif	Meneliti literasi keuangan, inklusi keuangan, dan kinerja UMKM	Penelitian menggunakan inklusi keuangan sebagai variabel intervening	<i>International Journal of Innovative Science and Research Technology</i> , 5(12), 2456-2165
5	Musthafa. (2023) <i>Financial Literacy And Performance Of Micro, Small And Medium Enterprises: A Literature Review</i>	Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM	Studi Literatur, Kuantitatif, Deskriptif	Meneliti literasi keuangan dan kinerja UMKM	Penelitian berbentuk review literatur, bukan survei lapangan	<i>Journal Of Management, Accounting, General Finance And International Economic ISSUES</i> , 3(1), 287–303. https://doi.org/10.55047/marginal.v3i1.956

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Machethe, C.L. (2020). <i>Bridging the Financial Inclusion Gender Gap in Smallholder Agriculture in Nigeria: An Untapped Potential for Sustainable Development</i>	Inklusi keuangan meningkatkan kinerja UMKM	Kuantitatif, Deskriptif Verifikatif	Meneliti <i>Financial Inklusi</i> dan kinerja UMKM	Lokasi penelitian berbeda (Nigeria), sektor usaha berbeda (pertanian)	<i>World Development</i> , 127, 104755
7	Nurwulandari. (2022). <i>The Effect Of Financial Inclusion And Financial Literacy On Msme Financial Performance</i>	Inklusi keuangan dan literasi keuangan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM	Kuantitatif, Deskriptif Verifikatif	Meneliti inklusi keuangan dan literasi keuangan terhadap kinerja UMKM	Lokasi dan metode pengumpulan data berbeda	INFOKUM, 10(5), 1344-1350. Retrieved from https://infor.seaninstitute.org/index.php/infokum/article/view/1382
8	Aritonang. (2022). <i>The Effect of Financial Literacy and Financial Inclusion on MSMEs Performance (Case Study in MSMEs Assisted by SME DPW North Sumatra Province)</i>	Sikap keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM	Kuantitatif, Deskriptif Verifikatif	Meneliti sikap keuangan dan kinerja UMKM	Penelitian ini menambah variabel perilaku keuangan, lokasi penelitian berbeda	<i>Proceedings of the 19th International Symposium on Management (INSYMA 2022)</i>
9	Saskia. (2023). <i>The Influence of Financial Inclusion, Financial Literacy and Financial Behavior on Company Performance in MSMEs in Makassar City</i>	Sikap keuangan dan pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap kinerja UKM	Kuantitatif, Deskriptif Verifikatif	Meneliti sikap keuangan dan kinerja UMKM	Lokasi penelitian di Malaysia, variabel tambahan berbeda	<i>International Journal of Economic Research and financial Accounting (IJERFA)</i> Volume 1, Number 4, July 2023, Page. 146 – 156

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Sari. (2022). <i>The Role Of Financial Literacy And Financial Inclusion In Improving Msme Performance: A Case Study In Kota Pari Village</i>	Sikap keuangan berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan UMKM	Kuantitatif, Deskriptif Verifikatif	Meneliti sikap keuangan dan kinerja UMKM	Penelitian ini fokus pada UMKM kuliner, perilaku pengelolaan keuangan sebagai variabel dependennya	JCRS (<i>Journal Of Community Research And Service</i>) Vol. 7, No. 2, July2023ISSN (print): 2549-1849 ISSN (online): 2549-3434
11	Fitriyah, Hermawan, A., & Sudarsono, N. (2023). <i>The Impact Of Financial Literacy, Financial Attitudes And Financial Behaviour On MSMEs Growth.</i>	Terdapat Pengaruh sikap keuangan terhadap kinerja UMKM	Kuantitatif, Deskriptif Verifikatif	Meneliti Sikap Keuangan dan kinerja UMKM	Menambahkan variabel perilaku keuangan, tempat penelitian berbeda	<i>International Journal of Science, Technology & Management</i> , 4(6), 1560-1566. https://doi.org/10.46729/ijstm.v4i6.979
12	Amin, H. (2020). <i>The Effects of Financial Knowledge, Socialisation, Attitude and Skill of Malaysian SMEs Performance</i>	Terdapat Pengaruh sikap keuangan terhadap kinerja UMKM	Kuantitatif, Deskriptif Verifikatif	Meneliti Sikap Keuangan dan kinerja UMKM	Lokasi penelitian di Malaysia, tambahan variabel pengetahuan dan sosialisasi keuangan	<i>International Journal of Industrial Management</i> , 8(1), 1-11. Retrieved from https://doi.org/10.15282/ijim.8.0.2020.5758
13	Worokinasih. (2021). <i>Financial Knowledge Digital Financial Knowledge, Financial Attitude, Financial Behaviour and Financial Satisfaction of Millenials</i>	Terdapat Pengaruh sikap keuangan terhadap kinerja UMKM	Kuantitatif, Deskriptif Verifikatif	Meneliti Sikap Keuangan dan kinerja UMKM	Berfokus pada kelompok milenial, variabel dependen kepuasan keuangan	<i>Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2021</i> ,
14	Dewanta, P. (2023). <i>The influence of financial literacy and financial attitude on financial</i>	Terdapat Pengaruh sikap keuangan terhadap kinerja UMKM	Kuantitatif, Deskriptif Verifikatif	Meneliti Sikap Keuangan dan kinerja UMKM	Objek penelitian UMKM kuliner, lokasi penelitian berbeda	<i>International Journal of Research in Business and Social Science</i> (2147- 4478), 12(1), 165–173. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i1.2301

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	Wilschut, A. (2020). <i>Financial literacy of high school students in the Netherlands: knowledge, attitudes, self-efficacy, and behavior</i>	Terdapat Pengaruh sikap keuangan terhadap kinerja UMKM	Kuantitatif, Deskriptif Verifikatif	Meneliti Sikap Keuangan	Subjek penelitian adalah pelajar SMA di Belanda, bukan UMKM	<i>International Review of Economics Education</i> , 34, 100185. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.iree.2020.100185

Sumber : Diolah Penulis, 2024

2.3 Kerangka Pemikiran

Kinerja UMKM mencakup tidak hanya aspek finansial tetapi juga aspek non-finansial seperti tingkat kepuasan pelanggan, inovasi produk, serta kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan (Hasibuan, 2020: 9). Indikator utama dalam mengukur kinerja UMKM meliputi aspek keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya, kinerja tersebut dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan, inklusi keuangan, serta sikap keuangan para pelaku UMKM (Kaplan & Norton, 2020: 75).

Literasi keuangan merupakan pemahaman terhadap informasi terkait keuangan serta kemampuan menerapkannya dalam pengambilan keputusan finansial yang tepat, khususnya dalam konteks keuangan pribadi (Vitt dalam Allianz, 2020: 14). Pemahaman ini membantu pelaku UMKM untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif melalui pembuatan anggaran yang akurat,

perencanaan keuangan jangka panjang, pengelolaan biaya secara bijak, serta manajemen kas yang efisien. Penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan memberikan dampak terhadap kinerja UMKM (Kemala Fikri, 2023: 4; Aribawa, 2019: 3; Alaaraj & Bakri, 2020: 3; Herrera, 2023: 5).

Dalam praktiknya, literasi keuangan memungkinkan pelaku usaha, konsumen, serta masyarakat luas untuk tidak hanya memahami produk dan jasa keuangan tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka dalam pengambilan keputusan finansial. Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa tingkat literasi keuangan yang tinggi berpengaruh terhadap kinerja UMKM (Mallik, 2021: 5; Zulkieflimansyah dkk., 2020: 2).

Literasi keuangan yang memadai dapat mendorong UMKM melakukan analisis keuangan secara lebih baik, mengevaluasi kinerja usaha secara tepat, serta mengambil keputusan strategis yang efektif. Hal tersebut membantu UMKM dalam merancang strategi pertumbuhan bisnis, mengenali peluang investasi baru, serta menghadapi berbagai tantangan ekonomi secara lebih percaya diri dan matang.

Inklusi keuangan merupakan upaya yang bertujuan memberikan akses layanan keuangan formal kepada individu maupun rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki akses tersebut, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka (Mallick, S. K., 2019: 89). Inklusi keuangan terbukti berdampak terhadap peningkatan kinerja UMKM, di mana semakin baik tingkat inklusi keuangan, semakin efektif pula pelaku UMKM dalam mengelola dan mengambil keputusan keuangan.

Salah satu manfaat utama inklusi keuangan adalah meningkatnya akses UMKM terhadap sumber permodalan dan pembiayaan. Kemudahan akses pada lembaga perbankan atau keuangan lainnya memungkinkan UMKM memperoleh pinjaman, kredit mikro, serta berbagai layanan finansial lainnya untuk menunjang kelangsungan dan ekspansi bisnis mereka. Penelitian Yanti (2019: 3) mengungkapkan bahwa meskipun peluang usaha bagi masyarakat semakin luas, pelaku UMKM masih terkendala dalam pengembangan usaha akibat keterbatasan modal. Oleh karena itu, inklusi keuangan menjadi solusi strategis dalam mengatasi persoalan tersebut dengan menyediakan produk keuangan seperti kredit, tabungan, pembayaran, hingga asuransi yang dapat diakses secara mudah dan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Lebih lanjut, inklusi keuangan juga meningkatkan efisiensi operasional UMKM. Menurut Machethe (2020: 4), pemanfaatan layanan perbankan digital dapat membantu UMKM dalam melakukan transaksi keuangan secara lebih cepat, aman, serta efisien, sekaligus mengurangi biaya administratif dan meningkatkan ketelitian dalam pencatatan keuangan. Selain itu, akses ke berbagai instrumen keuangan seperti rekening bank, kartu kredit atau debit, asuransi, dan produk investasi yang relevan, memberikan UMKM kesempatan untuk mengelola keuangan mereka secara optimal.

Dukungan inklusi keuangan bagi UMKM juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal secara umum. Kesuksesan UMKM mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di lingkungan sekitar (Nurwulandari,

2022: 2). Meski demikian, kendala utama dalam inklusi keuangan biasanya terkait dengan persyaratan ketat dari lembaga keuangan, seperti kebutuhan jaminan fisik atau catatan kredit yang kuat. Hal ini menyebabkan banyak pelaku UMKM merasa ragu atau tidak mampu mengakses produk keuangan formal (Oppernan, 2023: 4; Lee, Wang & Ho, 2020: 7; Abor, Adjasi & Lensink, 2020: 7).

Sikap keuangan adalah persepsi dan kepercayaan individu yang memengaruhi bagaimana merencanakan dan mengelola keuangan Pelaku UMKM. Sikap ini dapat mencakup aspek-aspek seperti rasa cemas terhadap keuangan, kecenderungan untuk menunda keputusan finansial, atau keinginan untuk berinvestasi dan merencanakan masa depan secara lebih hati-hati (Parotta dan Johnson dalam Wijaya, G. E, 2020: 3).

Pemilik UMKM dengan sikap keuangan yang baik cenderung membuat keputusan finansial yang lebih baik. Pelaku usaha dapat menilai dengan cermat investasi yang menguntungkan, memprioritaskan penggunaan dana untuk pertumbuhan bisnis, serta mengelola arus kas dengan efisien untuk mendukung operasi sehari-hari. Sikap keuangan yang baik mencerminkan profesionalisme dan kredibilitas UMKM dalam hubungannya dengan pihak eksternal, seperti investor, pemasok, atau lembaga keuangan. Ini dapat meningkatkan kepercayaan dan membuka pintu untuk akses lebih besar terhadap modal, peluang kemitraan, atau pasar baru. Sikap keuangan yang baik juga memengaruhi hubungan UMKM dengan pelanggan dan pemasok. UMKM yang dapat dipercaya dalam hal keuangan cenderung membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan loyal yang senang merekomendasikan produk, serta memperkuat jaringan dengan pemasok

yang dapat diandalkan (Amin, H, 2020). Sikap keuangan diartikan sebagai keadaan pikiran, pendapat, serta penilaian tentang keuangan yang diaplikasikan kedalam sikap (Pankow dalam Dewi, A. S, 2021). Sikap keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Permasalahan dari sikap keuangan bersumber dari sikap pelaku UMKM sering kali melakukan pengeluaran tanpa perencanaan yang matang, seperti pembelian peralatan atau bahan baku yang tidak mendesak, yang dapat mengganggu aliran kas dan anggaran Operasionalisasi (Ratnawati, 2023, Haryadi, 2023, dan Rahadjeng, 2023).

Literasi keuangan mempengaruhi inklusi keuangan. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Tri Winanta dan Fivi Anggraini (2020: 4) mengungkapkan bahwa modal sosial memiliki peran sebagai mediator dalam hubungan antara literasi keuangan dengan inklusi keuangan, namun teknologi finansial (*financial technology*) tidak memiliki efek mediasi dalam hubungan tersebut.

Di sisi lain, peningkatan literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi finansial terbukti mampu mendorong peningkatan inklusi keuangan secara umum. Menurut Peni Widarti (2019), individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang produk dan layanan keuangan serta mampu memanfaatkan teknologi finansial akan lebih mudah mengakses berbagai layanan keuangan formal secara efektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan yang tinggi, didukung oleh modal sosial yang kuat dan pemanfaatan teknologi finansial, merupakan faktor kunci dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan

keuangan formal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM
2. Inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM
3. Sikap keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM